

## TRADE AND INDUSTRY BRIEF

Mohamad D. Revindo, Ph.D. (revindo@lpem-feui.org)  
Devianto, S.E. (devianto@lpem-feui.org)

Neraca perdagangan non-migas Indonesia pada Mei 2019 mencatat surplus USD1,19 miliar, mampu menutup defisit neraca migas USD0,98 miliar, sehingga neraca perdagangan Indonesia secara total mencatat surplus USD0,21 miliar. Surplus Mei 2019 ini disebabkan oleh kombinasi membaiknya nilai tukar riil ekspor-impor dan meningkatnya volume ekspor Indonesia. Berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat (AS)-Tiongkok belum memukul langsung perdagangan Indonesia, tetapi perlu disikapi dengan cermat bukan melalui kebijakan perdagangan saja, tetapi kebijakan yang mendasar dalam hal iklim usaha atau investasi.

*Trade and Industry Brief* edisi Juni ini memberikan perspektif singkat terhadap perkembangan ekspor dan impor Indonesia per akhir Mei 2019, meliputi perkembangan nilai, volume, harga, jenis produk dan negara tujuan. Edisi ini juga menyajikan secara singkat dampak perkembangan perang dagang AS-Tiongkok terhadap Indonesia. Data dan informasi dihimpun dari Berita Resmi Statistik BPS, Statistik Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia, *ITC Trademap* dan berbagai sumber lainnya.

### A. Ringkasan Angka Penting

#### Neraca perdagangan barang:

- ◆ Total: surplus USD0,21 miliar (Mei '19); defisit USD2,14 miliar (Jan-Mei '19)
- ◆ Migas: defisit USD0,98 miliar (Mei '19); defisit USD3,75 miliar (Jan-Mei '19)
- ◆ Nonmigas: surplus USD1,19 miliar (Mei '19); surplus USD1,61 miliar (Jan-Mei '19)

#### Harga produk (*Terms-of-trade*):

- ◆ Perubahan harga produk ekspor: 3,10% (Mei '19 *m-to-m*), -17,94% (Mei '19 *y-on-y*)
- ◆ Perubahan harga produk impor: -9% (Mei '19 *m-to-m*), -7,75% (Mei '19 *y-on-y*)

#### Pertumbuhan nilai ekspor:

- ◆ Total: 12,42% (Mei '19 *m-to-m*); -8,99% (Mei '19 *y-on-y*); -8,61% (Jan-Mei '19 *y-on-y*)
- ◆ Migas: 50,19% (Mei '19 *m-to-m*); -31,77% (Mei '19 *y-on-y*); -21,44% (Jan-Mei '19 *y-on-y*)
- ◆ Nonmigas: 10,16% (Mei '19 *m-to-m*); -6,44% (Mei '19 *y-on-y*); -7,33% (Jan-Mei '19)

#### Komposisi nilai ekspor non-migas:

Industri pengolahan (74,59%), Pertambangan dan Penggalian (15,63%), Pertanian (1,98%)

#### Produk utama ekspor nonmigas:

Bahan bakar mineral (15,25%), Lemak dan minyak hewan/nabati (10,89%), Mesin/peralatan listrik (5,21), Kendaraan dan bagiannya (5,02%), Perhiasan/permata (3,82%)

#### Negara tujuan utama ekspor nonmigas:

Tiongkok (15,13%), AS (11,49%), Jepang (8,98%), India (7,87%) dan Singapura (5,40%)

#### Pertumbuhan nilai impor:

- ◆ Total: -5,62% (*m-to-m*); -17,71% (*y-on-y*); -9,23 (Jan-Mei '19 *y-on-y*)
- ◆ Migas: -6,41% (*m-to-m*); -26,89% (*y-on-y*); -23,77% (Jan-Mei '19 *y-on-y*)
- ◆ Nonmigas: -5,48% (*m-to-m*); -15,94% (*y-on-y*); -6,60% (Jan-Mei '19 *y-on-y*)

#### Komposisi impor:

- ◆ Berdasarkan penggunaan: Bahan baku dan penolong (74,76%), Barang modal (16,20%), Barang konsumsi (9,04%)
- ◆ Berdasarkan produk utama: Mesin/pesawat mekanik (17,67%), Mesin dan peralatan listrik (12,84%); Besi dan baja (7,08%), Plastik dan barang dari plastik (5,99%), Ampas/sisa industri makanan (1,88%).

## B. Ringkasan Kinerja dan Prospek Perdagangan dan Industri

### 1. Neraca Perdagangan dan Harga Komoditas

Neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2019 mencatat surplus USD0,21 miliar, setelah pada April sebelumnya mencatatkan defisit tertinggi sepanjang 2019 senilai USD2,29 miliar pada. Surplus Mei 2019 ini didorong oleh meningkatnya surplus neraca non-migas (USD1,19 miliar) yang diiringi turunnya defisit neraca migas (USD0,98 miliar). Sebagai perbandingan, pada April lalu neraca non-migas mencatat defisit USD0,79 miliar dan neraca migas defisit USD1,49 miliar.

Dari sisi volume barang, total ekspor pada Mei 2019 mengalami peningkatan 9,04 persen dibandingkan April sementara volume impor hanya meningkat 3,71 persen. Selain itu, harga rata-rata produk ekspor meningkat 3,10 persen yang disertai turunnya harga rata-rata produk impor 9 persen. Dengan kata lain, surplus Mei 2019 disebabkan oleh kombinasi dari meningkatnya *terms-of-trade* atau nilai tukar riil ekspor-impor Indonesia dan meningkatnya volume ekspor Indonesia.

Meskipun demikian, secara kumulatif sepanjang Januari-Mei 2019 posisi neraca perdagangan Indonesia masih berada dalam keadaan defisit USD2,14. Surplus neraca perdagangan non-migas USD1,61 miliar sepanjang 2019 belum sanggup menutupi defisit neraca migas USD3,75 miliar.

### 2. Kinerja Ekspor

Kinerja ekspor Indonesia pada Mei 2019 menunjukkan peningkatan dari kelesuan April. Nilai total ekspor Indonesia pada Mei tercatat USD13,6 miliar atau meningkat 12,42 persen dibanding April.

Komposisi ekspor sepanjang Mei 2019 lebih didominasi oleh produk non-migas (92,2 persen) dibandingkan migas (7,8 persen). Komoditas utama ekspor migas adalah gas dan

minyak mentah, sedangkan hasil olahan minyak dan gas masih sangat terbatas. Kontributor utama ekspor non-migas adalah produk industri pengolahan (74,59 persen) disusul pertambangan dan penggalian (15,63 persen) dan terakhir pertanian (1,98 persen).

Berdasarkan kelompok produknya, kontributor utama ekspor non-migas sepanjang lima bulan pertama 2019 adalah: 1) HS 27: Bahan bakar mineral (15,25 persen); 2) HS 15: Lemak dan minyak hewani/nabati (10,89 persen); 3) HS 85: Mesin/peralatan listrik (5,21 persen); 4) HS 87: Kendaraan dan bagiannya (5,02 persen); dan 5) HS 71: Perhiasan/permata (3,82 persen).

Negara yang menjadi tujuan ekspor utama produk non-migas Indonesia sepanjang Januari-Mei 2019 adalah Tiongkok (15,13 persen dari total ekspor). Negara tujuan ekspor utama berikutnya secara berturut-turut adalah Amerika Serikat (11,49 persen), Jepang (8,98 persen), India (7,87 persen) dan Singapura (5,40 persen). Peran kelima negara tujuan utama tersebut mencapai 48,87 persen dari total nilai ekspor keseluruhan, sementara kontribusi ekspor ke 13 negara tujuan utama pada periode ini mencapai 70,49 persen.

Ditinjau dari provinsi asalnya, lima provinsi dengan sumbangan ekspor barang terbesar sepanjang Januari-Mei 2019 adalah Jawa Barat (18,14 persen), Jawa Timur (11,41 persen), Kalimantan Timur (10,19 persen) Riau (7,16 persen) dan Banten (7 persen). Kelima provinsi tersebut menyumbangkan lebih dari separuh dari seluruh nilai ekspor barang nasional.

### 3. Perkembangan Impor

Pada Mei 2019, nilai impor Indonesia tercatat USD14,53 miliar, meningkat 5,62 persen dibandingkan April 2019 tetapi turun 17,71 persen dibandingkan Mei 2018.

Kontributor utama impor Indonesia pada Mei 2019 adalah produk non-migas (87,13

persen dari total nilai impor), sedangkan sisanya adalah komoditas migas (12,87 persen) yang sebagian besarnya berupa hasil olahan minyak bumi untuk bahan bakar dan bahan baku industri. Berdasarkan penggunaannya, sebagian besar impor Indonesia pada Mei 2019 digunakan untuk bahan baku dan penolong (74,76 persen) berikutnya untuk barang modal (16,20 persen), dan hanya sebagian kecil digunakan untuk penggunaan akhir atau konsumsi langsung (9,04 persen).

Secara lebih spesifik berdasarkan jenis produknya, kontributor utama impor non-migas sepanjang Januari-Mei 2019 adalah: 1) HS 84: Mesin/pesawat mekanik (17,67 persen); 2) HS 85: Mesin dan peralatan listrik (12,84 persen); 3) HS 72: Besi dan baja (7,08 persen); 4) HS 39: Plastik dan barang dari plastik (5,99 persen); dan 5) HS 23: Ampas/sisa industri makanan (1,88 persen). Semua komoditas impor tersebut umumnya adalah input penting yang diperlukan untuk proses produksi barang dan jasa domestik.

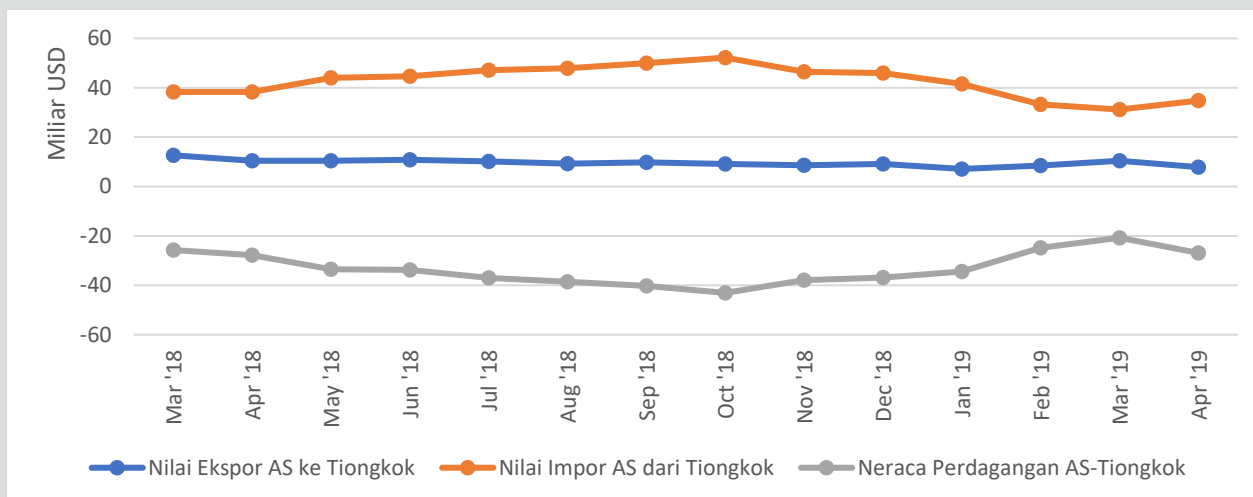
### C. Perkembangan Dampak Perang Dagang AS-Tiongkok terhadap Indonesia

Telah lebih dari setahun perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berlangsung sejak Presiden Trump mengumumkan pemberlakuan tarif untuk impor baja dan aluminium dari Tiongkok per 1 maret 2018, yang kemudian berkembang menjadi tarif untuk berbagai impor barang senilai USD50 miliar. Tiongkok kemudian merespon dengan pemberlakuan tarif untuk barang impor dari AS senilai USD60 miliar.

Hingga saat ini, perang dagang antara AS dengan Tiongkok masih berlangsung dinamis dan menarik untuk dicermati. Pada pertengahan Mei lalu, Huawei beserta beberapa perusahaan asal Tiongkok lainnya dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh AS, dengan konsekuensi larangan membeli

komponen dalam bentuk apapun dari perusahaan AS kecuali dengan persetujuan pemerintah AS. Tidak berhenti di situ, AS juga merencanakan penetapan tambahan tarif lagi untuk beberapa produk impor dari Tiongkok. Meskipun demikian, dalam pertemuan G20 di Tokyo bulan Juni ini AS mengisyaratkan akan memperlunak sikapnya terhadap Tiongkok.

Sulit diprediksi berapa lama perang dagang AS-Tiongkok akan berlangsung. Karena itu, perlu diwaspadai imbas negatifnya terhadap Indonesia, terutama karena kedua negara tersebut adalah tujuan ekspor terpenting bagi Indonesia. Pada Mei 2019, ekspor Indonesia ke Tiongkok dan AS mencapai 15,13% dan 11,49% persen dari total ekspor Indonesia secara keseluruhan.

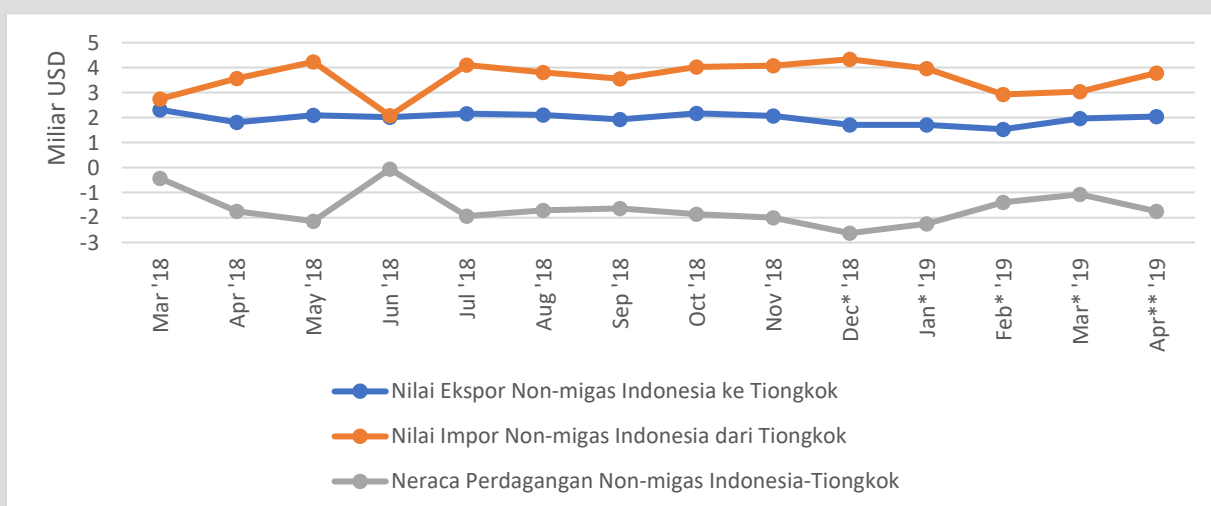


**Gambar 1. Nilai Perdagangan AS-Tiongkok, Maret 2018-April 2019**  
Sumber: United States Census Bureau (Juni 2019)

**Gambar 1** menunjukkan perkembangan nilai perdagangan AS-Tiongkok dalam kurun Maret 2018-April 2019. Terlihat bahwa saat AS memulai perang dagang pada Maret 2018 tidak serta merta impor barang dari Tiongkok berkurang, bahkan cenderung meningkat pada beberapa bulan pertama sehingga defisit perdagangan AS membesar hingga mencapai puncaknya pada Oktober 2018. Baru setelah itu impor AS dari Tiongkok cenderung mulai mengalami penurunan hingga Maret 2019

sehingga defisit menurun, meskipun pada April 2019 impor dan defisit kembali membesar.

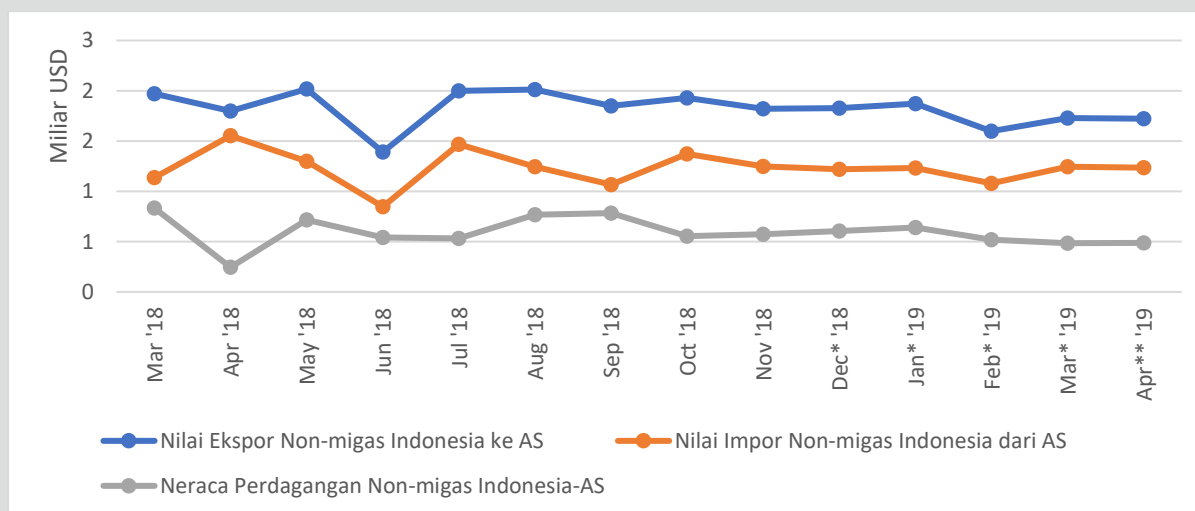
**Gambar 2** menunjukkan perdagangan non-migas Indonesia dan Tiongkok pada kurun Maret 2018-April 2019. Terlihat bahwa ekspor non-migas Indonesia ke Tiongkok tidak banyak terpengaruh sedangkan impornya berfluktuasi tajam. Meskipun demikian, defisit perdagangan bulanan Indonesia pada kuartal pertama 2019 cenderung lebih kecil daripada semester II-2018.



**Gambar 2. Nilai Perdagangan Non-Migas Indonesia-Tiongkok Maret 2018-Maret 2019**  
Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) April 2019

**Gambar 3** menunjukkan nilai perdagangan Indonesia dengan AS dalam kurun Maret 2018-April 2019. Terlihat bahwa pada beberapa bulan pertama setelah perang dagang AS-Tiongkok nilai ekspor dan impor Indonesia

dengan AS sempat berfluktuasi tetapi pada 2019 cenderung kembali stabil dengan neraca perdagangan yang selalu mencatat surplus untuk Indonesia.



**Gambar 3. Nilai Perdagangan Non-Migas Indonesia-AS, Maret 2018-Maret 2019**

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) April 2019

Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan hambatan perdagangan, khususnya hambatan tarif, tidak selalu efektif untuk menghambat impor, terutama dalam jangka pendek. Hal ini disebabkan beberapa hal. Pertama, sebagian besar transaksi ekspor-impor telah ditetapkan dalam kontrak untuk periode beberapa kuartal atau semester. Dalam kasus AS, impor dari Tiongkok tetap berjalan meskipun dengan tingkat tarif yang lebih tinggi.

Kedua, efek dari tarif terhadap impor mungkin tertutup oleh menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli serta sulit berubahnya selera konsumen. Dalam kasus AS, tarif impor yang tinggi justru dapat merugikan konsumen AS yang tetap membeli produk impor, yang secara tidak langsung ikut menanggung sebagian besar beban tarif.

Ketiga, sebagian perdagangan antar negara sebenarnya terjadi antar perusahaan pada suatu jaringan rantai produksi global tertentu. Sebagai contoh, dalam kasus AS sebagian pabrikan AS mengirim bahan baku

dan setengah jadi untuk komputer dan aksesorisnya, *smart phone*, alas kaki dan pakaian ke Tiongkok untuk diolah lebih lanjut atau dirakit dengan biaya yang murah. Produk akhir dari Tiongkok kemudian dikirim kembali ke AS dan dicatat sebagai impor oleh AS. Dalam situasi ini, lagi-lagi konsumen AS yang sebenarnya banyak menanggung beban tarif impor.

Tidak mengherankan jika perang dagang AS-Tiongkok yang masih sebatas perang tarif belum banyak merubah pola perdagangan kedua negara, yang pada gilirannya juga tidak banyak merubah pola perdagangan AS-Indonesia dan Tiongkok-Indonesia. Kekurangefektifan hambatan tarif ini sebenarnya telah banyak membuat berbagai negara dunia saat ini telah beralih ke strategi lain, yaitu hambatan non-tarif seperti standar keamanan dan kesehatan, standar teknis, inspeksi pra-pengapalan, anti-dumping, subsidi, dll. Selain itu, pola perdagangan AS-Tiongkok juga baru akan berubah drastis jika dalam jangka menengah-panjang terjadi

perubahan pola investasi, misalnya perusahaan Tiongkok memindahkan investasinya dari AS atau sebaliknya. Dalam hal tersebut, kegiatan ekspor-impor antar perusahaan dalam jaringan rantai produksi di kedua negara baru akan menurun.

Bagi Indonesia, perkembangan ini dapat disikapi dengan beberapa cara. Pertama, meningkatkan perhatian dan upaya untuk mengurangi hambatan non-tarif. Misalnya, diperlukan penguatan tim ahli kementerian untuk membuktikan dumping produk impor sekaligus membantah tuduhan dumping atas produk ekspor Indonesia. Contoh upaya lain, bekerjasama dengan karantina negara tujuan ekspor untuk mengurangi penolakan ekspor produk pertanian dan perikanan.

Kedua, data yang dipaparkan di atas juga menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak kalah strategis dibanding kebijakan perdagangan adalah kebijakan investasi atau iklim usaha. Perang dagang AS-Tiongkok harus dipandang sebagai peluang untuk menarik investasi dari kedua negara ke Indonesia. Investasi di Indonesia mungkin menarik karena Indonesia tidak terlibat perang tarif dengan

kedua negara, yang berarti akan lebih murah bagi investor untuk memproduksi dan mengekspor ke AS via Indonesia dibanding dari Tiongkok, atau ekspor ke Tiongkok via Indonesia dibanding dari AS.

Tercatat beberapa perusahaan asal AS (Harley Davidson, Flextronics, dll), Jepang (Panasonics, Komatsu, dll) dan Taiwan mulai berencana memindahkan produksinya dari Tiongkok ke Meksiko atau Asia Tenggara. Sayangnya, masih sangat sedikit yang melirik Indonesia. Senada dengan minimnya minat relokasi ke Indonesia, peringkat kemudahan berusaha Indonesia tahun ini justru turun satu peringkat ke 73 dari peringkat 72 di tahun lalu. Penurunan terjadi pada beberapa indikator seperti penegakan kontrak, perizinan konstruksi dan perlindungan pemegang saham (investor minoritas). Hal-hal tersebut, selain masalah umum seperti kualitas tenaga kerja, pengadaan lahan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kepastian insentif fiskal dan kemudahan non-fiskal, memerlukan upaya perbaikan yang lebih keras lagi.